

ANALISIS PERBEDAAN PANDANGAN ANTARA DINAS SOSIAL DAN TUNAWISMA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN TUNAWISMA DI KOTA TASIKMALAYA

Aditya Salman Nurmahmudi¹, Garindi Vitriatul Muntaha², Ghefira Nafisa³, Haura Mutiara⁴, Nabilla Cahya Aulya⁵, Rahmadhita Chaitra⁶, Reina Nurfaidah⁷, Venia Noviyanti⁸, Indri Ayu Widiyanti⁹

242103111051@student.unsil.ac.id¹, 242103111092@student.unsil.ac.id²,
242103111027@student.unsil.ac.id³, 242103111091@student.unsil.ac.id⁴,
242103111011@student.unsil.ac.id⁵, 242103111013@student.unsil.ac.id⁶,
242103111016@student.unsil.ac.id⁷, 242103111010@student.unsil.ac.id⁸,
indriayu@unsil.ac.id⁹

Universitas Siliwangi

ABSTRAK

Masalah tunawisma di Indonesia mencerminkan lemahnya perlindungan sosial dan keterbatasan layanan publik, khususnya kebutuhan psikososial. Di Kota Tasikmalaya (khususnya kawasan Jalan HZ Mustofa), penanganan pemerintah bersifat administratif dan jangka pendek, sementara tunawisma menghadapi masalah multidimensi. Analisis terhadap kesenjangan perspektif antara pemerintah dan tunawisma ini menjadi penting untuk memahami mengapa program yang ada tidak berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan pandangan antara Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tasikmalaya dan individu tunawisma terhadap efektivitas program penanganan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang mengintegrasikan analisis kebijakan dengan data empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan satu petugas Dinsos dari bidang Rehabilitasi Sosial dan sepuluh tunawisma, bertempat di sepanjang Jalan HZ Mustofa selama sekitar satu minggu. Hasil penelitian menunjukkan adanya kegagalan sistemik; seluruh subjek belum pernah menerima intervensi formal. Kesenjangan terjadi karena Dinsos fokus pada kendala administratif (syarat KTP/domisili dan kriteria produktivitas) serta ketiadaan rumah singgah lokal. Sementara itu, tunawisma menghadapi konflik keluarga, beban psikologis, dan stigma, sehingga menuntut stabilitas tempat tinggal dan dukungan pemulihan mental. Kesimpulan studi ini merekomendasikan transformasi paradigma dari pendekatan administratif-represif menuju model multidimensional dan humanis (Housing First), yang memprioritaskan hunian stabil, layanan psikososial intensif, serta reformasi regulasi untuk mengatasi hambatan yurisdiksi.

Kata Kunci: Tunawisma, Dinas Sosial, Kesenjangan Kebijakan, Psikososial.

ABSTRACT

The problem of homelessness in Indonesia reflects weak social protection and limited public services, especially regarding psychosocial needs. In Tasikmalaya City (particularly the Jalan HZ Mustofa area), government handling is administrative and short-term, while the homeless face multidimensional issues. Analyzing the perspective gap between the government and the homeless is crucial to understanding why existing programs are ineffective. This study aims to analyze the gap in views between the Social Service (Dinsos) of Tasikmalaya City and homeless individuals regarding the effectiveness of the handling program. The approach used is a qualitative approach with a case study method, integrating policy analysis with empirical data. Data collection involved in-depth interviews with one Dinsos official from the Social Rehabilitation sector and ten homeless individuals, conducted along Jalan HZ Mustofa for approximately one week. The results indicate a systemic failure; all subjects had not received formal intervention. The gap occurs because Dinsos focuses on administrative constraints (KTP/domicile requirements and productivity criteria) and the lack of a local shelter. Meanwhile, the homeless face family conflict, psychological burden,

and stigma, demanding residential stability and mental recovery support. The study concludes by recommending a paradigm shift from an administrative-repressive approach to a multidimensional and humanistic model (Housing First), which prioritizes stable housing, intensive psychosocial services, and regulatory reform to overcome jurisdictional barriers.

Keywords: Homelessness, Social Services, Policy Gaps, Psychosocial.

PENDAHULUAN

Di banyak sudut kota di Indonesia, masalah tunawisma masih menjadi salah satu masalah sosial yang masih belum terpecahkan. Mereka tidak hanya memperlihatkan kemiskinan, tetapi juga memperlihatkan kelemahan sistem perlindungan sosial, keterbatasan layanan publik, serta kerentanan psikososial yang tidak tertangani. Menurut Thamrin et al., (2025), banyak orang yang tunawisma menghadapi tantangan struktural seperti ketidakstabilan dalam pekerjaan, kurangnya dukungan keluarga, dan kesehatan mental yang tidak ditangani. Keadaan ini membuat sulit bagi mereka untuk kembali ke kehidupan yang lebih stabil. Penanganan yang pemerintah berikan tidak memenuhi kebutuhan jangka panjang karena biasanya bersifat administratif dan sementara.

Kota Tasikmalaya juga menjadi salah satu kota yang menghadapi masalah sejenis, terutama di wilayah Jalan HZ Mustofa, yang merupakan pusat tunawisma. Lokasi ini dipilih secara strategis untuk mencari pekerjaan informal, akses makanan yang kadang-kadang gratis, dan kermaian yang memungkinkan mereka bertahan hidup. Namun, tunawisma di tempat publik ini sering dianggap sebagai masalah ketertiban, sehingga pemerintah bergantung pada penertiban daripada pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan temuan Zhafari et al., (2025) yang mengatakan bahwa perawatan tunawisma di Indonesia menunjukkan pendekatan yang terlalu administratif, yang sering membuat mereka sulit mendapatkan bantuan dasar. Banyak orang yang tidak memiliki rumah tetap berada di jalan meskipun mereka tinggal di wilayah yang memiliki layanan pemerintah, karena masalah seperti tidak memiliki dokumen kependudukan, mobilitas yang tinggi, dan kebiasaan pelaporan yang pasif.

Terdapat juga penelitian yang menekankan pentingnya pendekatan sosial yang lebih manusiawi untuk menangani tunawisma. Pekerja sosial komunitas, menurut Karimah & Hasanah, (2024), berperan penting dalam mengatasi tunawisma melalui pendekatan empatik, pendampingan langsung, dan komunikasi yang lebih personal. Penemuan ini menunjukkan bahwa kebijakan resmi Dinas Sosial harus bekerja sama dengan pendekatan berbasis komunitas. Jika ini dilakukan, penanganan tunawisma tidak akan terbatas pada pencatatan administratif atau penertiban ruang publik.

Banyak penelitian telah membahas elemen pendampingan, pemberdayaan, dan dinamika kehidupan tunawisma, tetapi hanya sedikit kajian yang secara khusus membahas perbedaan perspektif antara tunawisma dan Dinas Sosial. Sementara itu, kegagalan program penanganan sering kali disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang kebutuhan dasar, cara mendapatkan bantuan, dan jenis intervensi yang dianggap tepat.

Pemerintah menilaikondisi tunawisma melalui regulasi, prosedur, dan keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, tunawisma bergantung pada pengalaman sehari-hari mereka dan kebutuhan mendesak mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki perbedaan perspektif tunawisma dan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tentang kondisi sosial di Jalan HZ Mustofa. Penelitian berkonsentrasi pada bagaimana kedua belah pihak memahami masalah tunawisma, kebutuhan yang dianggap penting, dan tantangan layanan yang terjadi dalam kenyataannya. Diharapkan pemahaman tentang perbedaan perspektif ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang perbedaan penanganan. Ini juga akan menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih terbuka dan berfokus pada pemulihan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan metode ini didasarkan pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada satu lokasi saja, yaitu Jalan HZ Mustofa. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat memahami secara langsung situasi tunawisma serta mengetahui bagaimana cara Dinas Sosial Kota Tasikmalaya menangani permasalahan tersebut melalui program-program yang tersedia secara mendalam dan kontekstual. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan satu orang petugas Dinas Sosial dari bidang Rehabilitas Sosial dan sepuluh orang tunawisma yang telah ditemui di sepanjang Jalan HZ Mustofa, Kota Tasikmalaya. Narasumber yang berada dalam penelitian ini dipilih secara kesengajaan karena telah dinilai relevan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Penelitian lapangan dilaksanakan selama sekitar satu minggu, dimulai dari proses perizinan hingga pengumpulan data di lapangan. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung untuk melihat kondisi tunawisma dan aktivitas yang berlangsung di sekitar lokasi penelitian. Dokumentasi dikumpulkan dalam bentuk notulensi hasil wawancara dan foto kondisi lokasi yang diambil selama proses observasi. Data yang telah didapat, lalu dianalisis memakai teknik analisis tematik dengan mengklasifikasikan hasil wawancara dan observasi ke dalam masalah-masalah utama yang hadir dalam penelitian ini. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi, yaitu dengan menyelaraskan informasi dari Dinas Sosial, tunawisma serta temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai penguat untuk memastikan konsistensi informasi yang dapat.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Hasil dari penelitian ini menyajikan analisis mendalam mengenai kesenjangan yang mencolok antara pandangan institusional Dinas Sosial dan realitas lapangan yang dialami oleh sepuluh individu tunawisma di Kota Tasikmalaya. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa implementasi program penanganan tunawisma belum mampu menyentuh akar permasalahan struktural, sosial, dan psikologis, sehingga menciptakan kegagalan perlindungan sosial yang sistemik.

A. Analisis Kesenjangan Program Penanganan Tunawisma oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya (Tambah referensi masih kurang dalam analisisnya)

Evaluasi terhadap mekanisme penanganan tunawisma yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya hambatan mendasar yang merusak efektivitas program, mulai dari fase identifikasi hingga rehabilitasi. Kesenjangan serius antara kebijakan ideal dan implementasi program penanganan tunawisma di lapangan sebagian besar berakar pada kombinasi faktor struktural dan operasional yang saling terkait. Permasalahan utama sering kali berasal dari keterbatasan sumber daya manusia dan finansial pada dinas pelaksana, di mana staf yang tersedia mungkin tidak cukup jumlahnya atau kurang memiliki pelatihan spesifik untuk melakukan penjangkauan yang konsisten dan sensitif, sementara keterbatasan anggaran membatasi penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai (Jaya, 2019). Selain itu, disintegrasi koordinasi lintas sektor menjadi penghalang signifikan, karena isu tunawisma bersifat multidimensional (melibatkan kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan), kegagalan menyinkronkan program antarinstansi menghasilkan respons yang terpecah-pecah alih-alih solusi yang holistik. Faktor krusial lainnya adalah defisit data dan mekanisme identifikasi yang akurat, yang menyebabkan kegagalan penjangkauan karena kelompok sasaran sering kali tidak terdaftar dalam basis data formal, sehingga intervensi hanya dapat diberikan secara reaktif.

Terakhir, struktur regulasi yang kaku dan tidak fleksibel menambah kompleksitas, di mana prosedur birokrasi yang rumit atau fokus kebijakan yang terlalu sempit (misalnya hanya pada penertiban) menghambat akses tunawisma terhadap bantuan rehabilitasi jangka panjang yang adaptif terhadap kebutuhan mereka yang beragam. Bukti empiris paling kuat adalah fakta bahwa seluruh sepuluh tunawisma yang menjadi subjek penelitian ini belum pernah mendapatkan intervensi atau bantuan sosial formal dari pemerintah (Maryatun et al., 2022). Kegagalan jaring pengaman sosial ini diperburuk oleh empat masalah operasional dan struktural, diantaranya:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Intervensi yang Reaktif

Dinas Sosial beroperasi dengan keterbatasan sumber daya manusia yang parah, di mana tim penjangkauan lapangan hanya diisi oleh sebelas personel untuk melayani seluruh wilayah kota. Beban kerja yang ditanggung oleh sebelas orang ini sangat tidak proporsional, mencakup seluruh siklus penanganan mulai dari penjangkauan awal, asesmen mendalam, rujukan ke panti, hingga monitoring pasca-rehabilitasi. Akibatnya, strategi intervensi Dinas Sosial bergeser dari proaktif menjadi reaktif, yang secara eksklusif bergantung pada laporan masuk dari masyarakat atau unit kepolisian. Kelompok tunawisma yang berhasil menghindari pandangan publik, seperti Ibu Qofifah yang memilih memulung di area terpencil selama lima tahun, secara otomatis luput dari sistem identifikasi. Keterbatasan ini menjadikan penanganan bersifat insidental, bukan berbasis data komprehensif, dan gagal menangkap kasus-kasus laten. Dalam Nur'aini & Milad, (2025) menekankan bahwa pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kompetensi pegawai merupakan faktor krusial untuk memastikan prosedur adopsi anak dijalankan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini secara langsung menggarisbawahi potensi masalah Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada dinas sosial di mana jika kompetensi dan kapabilitas aparatur tidak dikembangkan secara memadai, maka kualitas SDM yang ada akan menjadi terbatas. Keterbatasan ini bukan hanya bersifat kuantitas, tetapi terutama kualitas, yang menghambat kemampuan dinas untuk memberikan pelayanan berstandar tinggi.

Strategi pengembangan SDM yang disarankan dalam literatur bertujuan untuk membangun kesiapan mental dan sikap pelayanan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Tujuan ini menunjukkan kebutuhan akan pendekatan proaktif dalam penanganan kasus. Sebaliknya, jika Dinas Sosial menghadapi keterbatasan SDM terutama dalam hal kurangnya pelatihan teknis dan kesiapan mental pegawai cenderung tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memitigasi risiko sejak awal proses adopsi. Akibatnya, alih-alih bertindak proaktif untuk menjamin proses yang mulus dan sesuai hukum, dinas sosial terpaksa menjalankan peran sebagai pihak yang Intervensi Reaktif, yaitu hanya bertindak setelah masalah atau pelanggaran terjadi, seperti ketika muncul kasus adopsi bermasalah atau konflik hukum. Dengan demikian, investasi pada peningkatan SDM yang disoroti dalam teks merupakan kunci untuk bertransisi dari pelayanan yang reaktif menjadi pelayanan yang profesional dan proaktif.

2. Kesenjangan Yurisdiksi dan Administrasi Akibat Syarat KTP/Domisili

Hambatan administratif menjadi salah satu penyebab utama mengapa program dari Dinas Sosial gagal untuk menjangkau tunawisma di lapangan. Persyaratan seperti domisili KTP serta mekanisme pelaporan masyarakat membuat sebagian besar tunawisma tidak dapat mengakses bantuan, terutama mereka yang berstatus migran internal. Kasus Bapak Risaldi (asal Salopa) dan Pak Doni (asal Karawang) serta pasangan tunawisma yang baru dua bulan tiba dari Cilacap, memperlihatkan bahwa mobilitas tinggi dan ketiadaan dokumen kependudukan sesuai dengan wilayah tempat tinggal saat ini menempatkan mereka dalam posisi terpinggirkan. Kondisi ini selaras dengan temuan Izudin (2023), yang

menjelaskan bahwa masalah identification issue masih menjadi hambatan struktural dalam distribusi bantuan sosial, karena kelompok tunawisma kerap tidak memiliki dokumen identitas yang valid sehingga otomatis tersisih dari sistem layanan sosial. Hal ini diperkuat oleh (Handayani et al., 2025) yang menemukan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah melahirkan kebijakan yang cenderung urban bias, dimana kelompok pendatang dan populasi berpindah seringkali tidak dianggap sebagai penerima manfaat resmi di wilayah tempat mereka tinggal. Melihat kondisi tersebut, Salsabila et al., (2022) menyarankan perlunya pendekatan layanan sosial yang tidak sepenuhnya bergantung pada domisili administratif, supaya kelompok rentan seperti tunawisma dapat memperoleh perlindungan dasar secara lebih inklusif tanpa terhalang batas yurisdiksi.

3. Hambatan Struktural: Ketiadaan Fasilitas Penunjang (Rumah Singgah)

Hambatan struktural yang paling mendasar adalah ketiadaan tempat penampungan (shelter) atau rumah singgah sementara yang layak di tingkat Kota Tasikmalaya. Ketiadaan fasilitas ini merusak seluruh alur proses rehabilitasi sosial. Dinas Sosial terpaksa merujuk tunawisma ke fasilitas tingkat provinsi, yang menyebabkan proses asesmen, bimbingan, dan reintegrasi menjadi terfragmentasi dan terlambat. Siregar et al., (2024) melalui penelitian mereka menekankan bahwa upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis harus dimulai dari pengadaan rumah singgah yang terpusat dan mudah diakses agar pelayanan sosial dapat berjalan efektif. Ketiadaan fasilitas lokal ini juga memperkuat temuan Yusrizal & Asmara, (2020) yang menyoroti bahwa kebijakan penanggulangan gelandangan di tingkat daerah masih sering terkendala oleh kurangnya grand design yang komprehensif dan dukungan pendanaan untuk pembangunan shelter. Tanpa tempat tinggal yang stabil, segala upaya intervensi lain menjadi sia-sia. Selain itu, menurut Santoso et al., (2022) mengatakan bahwa daerah yang memiliki rumah singgah cenderung mampu melakukan asesmen lebih cepat dan memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, ketidakhadiran rumah singgah di Tasikmalaya bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menunjukkan celah kebijakan yang berdampak langsung pada keberlangsungan layanan sosial.

4. Dilema Kriteria "Produktivitas" yang Eksklusif

Pendekatan Dinas Sosial cenderung mengukur keberhasilan penanganan berdasarkan pada kriteria "produktivitas" individu. Penilaian ini berfokus pada kemampuan subjek untuk mengikuti pelatihan dan berpotensi menjadi wirausaha atau pekerja produktif. Walaupun bertujuan baik, kebijakan yang mendasarkan alokasi bantuan pada produktivitas ini berisiko menghasilkan keputusan yang subjektif dan eksklusif. Kriteria ini secara implisit mengesampingkan kelompok yang paling rentan, seperti lansia berusia 70 tahun yang sudah tidak mampu bekerja (kasus Ibu Omah) atau individu dengan kemungkinan gangguan mental (kasus Pak Rudi). Hikmal et al., (2024) mengkritik dalam penelitiannya, bahwa program pemberdayaan sosial masih gagal apabila indikator keberhasilannya hanya berfokus pada produktivitas ekonomi, tanpa mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, dan usia pada tunawisma tersebut. Zhafari et al., (2025) juga menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang efektif seharusnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok rentan, bukan hanya semata-mata mengukur kemampuan kerja saja. Temuan hasil lapangan dalam penelitian ini memperkuat argumen tersebut. Dengan mengandalkan produktivitas sebagai tolak ukur utama, sistem layanan sosial akan berpotensi mengabaikan individu yang justru berada pada tingkat kerentanan tertinggi. Akibatnya, mereka yang paling membutuhkan perlindungan dasar justru terjebak dalam siklus marginalisasi berulang, bukan karena ketidakmauan tetapi karena sistem yang tidak mengakomodasikan keterbatasan mereka.

B. Kompleksitas Masalah dan Realitas Psikososial Pada Sepuluh Individu Tunawisma

Realitas kehidupan sepuluh tunawisma menunjukkan bahwa masalah mereka jauh lebih kompleks daripada sekadar kekurangan materi; ini adalah krisis sosial, psikologis, dan eksistensial. Kesenjangan pandangan Dinas Sosial dan tunawisma terletak pada fokus intervensi: Dinas Sosial fokus pada output ekonomi, sementara tunawisma membutuhkan input psikososial dan stabilitas dasar.

Dimensi psikososial dan kebutuhan mendesak akan pemulihan mental, bagi sebagian besar subjek, masalah psikologis dan trauma masa lalu adalah faktor utama yang menghambat reintegrasi. Kasus Pak Rudi yang menunjukkan indikasi gangguan psikologis ringan, serta narasi tentang hilangnya kepercayaan diri dan trauma masa lalu, menggarisbawahi kegagalan Dinas Sosial dalam memberikan layanan yang holistik. Individu seperti ini membutuhkan layanan psikososial yang intensif dan pemulihan kesehatan mental, bukan sekadar pelatihan teknis. Bahkan, beberapa tunawisma secara psikologis mengembangkan mekanisme survival coping, di mana mereka memandang hidup di jalanan, meskipun keras, sebagai zona stabil yang dipilih secara defensif dibandingkan menghadapi ketidakpastian program rehabilitasi atau tekanan keluarga. Hal ini didukung oleh Roswendi, Achdiani, & Fatimah, (2025) yang menjelaskan bagaimana kehilangan tempat tinggal secara drastis mempengaruhi kondisi emosional dan mental, menegaskan bahwa penanganan harus dimulai dari pemulihan psikologis.

Krisis keluarga dan faktor pendorong struktural, analisis yang dilakukan terhadap sepuluh kasus menunjukkan bahwa krisis keluarga merupakan pendorong utama seseorang jatuh ke jurang tunawisma. Kasus Pak Doni, yang kehilangan stabilitas ekonomi setelah ditinggal istri, adalah contoh klasik. Kurangnya dukungan keluarga dan ketiadaan program konseling atau dukungan ekonomi transisional pasca-krisis membuat seseorang cepat terlempar dari jaring pengaman sosial Syahputra & Saputra, (2020) memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa disintegrasi keluarga, konflik internal, atau kehilangan figur utama dapat secara tiba-tiba menghilangkan dukungan finansial dan emosional, memaksa individu untuk mencari tempat tinggal baru di ruang publik. Hal ini menunjukkan perlunya Dinas Sosial beralih dari fokus rehabilitasi pasca-tunawisma menjadi fokus pencegahan dini dan mediasi keluarga.

Stigma sosial, tindakan represif, dan eksklusi struktural, kisah-kisah dari tunawisma ini menunjukkan bahwa mereka adalah korban dari stigma sosial yang kuat, yang semakin diperparah oleh kebijakan yang bersifat represif. Tindakan penertiban (razia) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sering dilakukan, meskipun diakui sebagai upaya menjaga ketertiban, justru memperkuat stigma dan diskriminasi sosial. Kasus seorang pria asal Cirebon yang pernah berkonflik dengan masyarakat akibat tuduhan pencurian, membuktikan bahwa stigma menyebabkan mereka kehilangan hak dasar. Idza, (2023) menyebutkan bahwa pendekatan represif tidak memberikan solusi berkelanjutan karena hanya menggeser tunawisma. Studi ini menyimpulkan bahwa penanganan yang efektif membutuhkan penyediaan tempat tinggal permanen yang dilengkapi dengan layanan pendukung (model Housing First) (Siregar et al., 2024).

Secara keseluruhan, perbedaan pandangan antara Dinas Sosial dan tunawisma terletak pada prioritas: Dinas Sosial memprioritaskan kepatuhan administratif dan produktivitas, sementara tunawisma memprioritaskan keamanan psikologis, stabilitas tempat tinggal, dan penghapusan stigma. Studi ini menyimpulkan bahwa penanganan yang efektif membutuhkan pendekatan multidimensional yang humanis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara cara dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya menjalankan program penanganan tunawisma dengan kebutuhan nyata yang dirasakan oleh sepuluh individu tunawisma di jalanan. Perbedaan ini menunjukkan kegagalan sistem dalam melindungi warga, yang bukti paling nyatanya adalah tidak ada satu pun dari sepuluh tunawisma yang pernah menerima bantuan formal dari pemerintah. Kesenjangan ini terjadi karena Dinas Sosial terlalu fokus pada aturan administrasi dan patokan "bisa menghasilkan uang" (produktivitas), bukan pada kondisi manusiawi mereka. Masalah utamanya adalah:

1. Birokrasi yang Menghambat: Dinas Sosial kekurangan staf, bergerak lambat, dan terlalu bergantung pada syarat KTP yang membuat kelompok tunawisma yang sering berpindah tempat (migran internal) tidak mungkin mendapatkan bantuan.
2. Kekurangan Fasilitas: Tidak adanya rumah singgah yang layak di kota membuat proses rehabilitasi terhenti, karena mereka harus dirujuk jauh ke provinsi.
3. Patokan yang Salah: Program Dinas Sosial seringkali hanya menilai tunawisma dari kemampuan mereka untuk segera bekerja. Pendekatan ini secara otomatis mengabaikan dan merugikan kelompok paling lemah, seperti lansia dan mereka yang memiliki gangguan mental.

Di sisi lain tunawisma, pendorong utama mereka ada di jalanan ternyata bukan hanya masalah uang, tetapi masalah mental dan sosial, seperti hancurnya keluarga, trauma masa lalu, serta tekanan terus-menerus dari stigma dan razia Satpol PP.

Maka dari itu, penanganan tunawisma harus berubah total dari sekadar menertibkan dan memberi pelatihan singkat, menjadi pendekatan yang lebih manusiawi dan menyeluruh. Langkah ke depan adalah memastikan mereka mendapatkan tempat tinggal stabil terlebih dahulu (seperti model Housing First), baru kemudian memberikan bantuan psikologis intensif, dan mempermudah aturan agar bantuan bisa sampai ke siapa pun yang membutuhkan, tanpa terhalang urusan KTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, A. T. P., Fauzi, L. M., & Rohayatin, T. (2025). Peran Dinas Sosial Dalam Menaggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung. *Praxis Idealis : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 02(01). <https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.2609>
- Hikmal, M., Malik, I., & Wahid, N. (2024). Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Perkotaan. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 122–136. <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15458>
- Idza, A. A. (2023). Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Analisis Dampak Dan Solusi. *Jurnal Tatapamong*, 5(September), 145–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859>
- Izudin, A. (2023). Examining social policies in homelessness issues: Insight from Indonesian grassroots. *WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 15–31. <https://doi.org/10.14421/welfare.2023.121-02>
- Jaya, I. (2019). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya. *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 42–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/jispar.v8i1.612>
- Maryatun, M., Tri Raharjo, S., & Muhammad Taftazani, B. (2022). Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppk) (Studi Pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 103–117. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5208>
- Niswutun Hasanah, & Karimah, F. (2024). Addressing Street Children, Vagrants, and Beggars

- through the Role of Community Social Workers in Yogyakarta. WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.14421/welfare.2023.131-01>
- Nur'aini, L., & Mohammad Khusnu Milad. (2025). Analisis Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Adopsi Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan, 6(2), 341–354.
- Roswendi, A. A. F., Achdiani, Y., & Fatimah, S. N. (2025). Psikologi Anak Tunawisma: Bagaimana Kehilangan Tempat Tinggal Mempengaruhi Perkembangan Emosional. Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling, 12(1), 71–80.
- Salsabila, Q., Gabriela Purba, & Selvia Evayanti Saragih. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, 3(3), 132–141. <https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.85>
- Santoso, B. I., Yulyana, E., & Lina Aryani. (2022). Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Permasalahan Tuna Sosial Di Kota Bekasi (Studi pada Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan). Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(2), 213–223. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2699>
- Siregar, S. S., Ritonga, F. U., & Ginting, B. (2024). Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan melalui Pengadaan Rumah Singgah. 2.
- Syahputra, A. sigit, & Saaputra, A. (2020). Pola Perilaku Tunawisma Saat Bermalam Di Ruang Publik Kota Surakarta. SIAR 2020: Seminar IlmiahArsitektur, 8686, 30–39.
- Thamrin, H., Singh, P. J. S., Yahaya, M. H., Ridho, H., Mazdalifah, & Moulita. (2025). Inklusi Sosial Sebagai Strategi Reintegrasi Tunawisma : Pembelajaran Komparatif Kota Medan dan Pulau Penang. Media Pemikiran & Aplikasi 19 (1), 15–26.
- Yusrizal, & Asmara, R. (2020). Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara). REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 16–28. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2606>
- Zhafari, M. H., Ritonga, F. U., & Suriadi, A. (2025). Pendampingan Sosial Terhadap Klien Tunawisma Sebagai Upaya Pemulihan Fungsi Sosial Di Dinas Sosial Kota Binjai. Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa), 5(9), 131-140. <https://doi.org/10.34743/q56wg897>